



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toli-toli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat lahir Ogotua, tanggal 14 Januari 1999(Umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, **xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon I**

PEMOHON 2, tempat lahir Simuntu, tanggal 26 Februari 1999 (Umur 23 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, **xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii. tertanggal 11 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 2017 di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx xxxxxxxx.namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pemohon telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada petugas pembantu Nikah (P2N) namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
 3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, umur 18 tahun pada saat menikah sedangkan Pemohon II adalah Perawan umur 18 tahun pada saat menikah;
 4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Usman Arumi sedangkan Wali nikahnya adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Saparudin dan yang menjadi saksi adalah Ahdal Harun dan A. Fajrin Dengan Mahar 5 gram Emas;
 5. Bahwa maksud para pemohon melakukan isbat adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pemikahan antara pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah ;
 6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Muh. Naufal Arrazzaq bin Awis Sugito , umur 2 tahun'
 2. Muh. Aksa Alfaruk bin Awis Sugito, umur 2 bulan
 7. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan Kelengkapan administrasi Kependudukan;
 8. Bahwa para Pemohon termasuk keluarga tidak mampu sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx, nomor : 474.08-285/SKTM/DS/X/2022, tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 di xxxx xxxxxxxx diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli TA 2022

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain.mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, olehnya itu perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. **Bukti Surat**

1. **Fotokopi Kartu tanda Penduduk** atas nama Pemohon I (**Awis Sugito**) Nomor 7204020707010001. yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 09 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, (**P.1**);
2. **Fotokopi Kartu tanda Penduduk** atas nama Pemohon II (**Rifana**) Nomor 7204016602990001. yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pencatatan sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Simuntu, 05 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2017 di xxxx xxxxxxxx, kecamatan Dampal Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saparudin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bapak Ahdal Harun dan Bapak A. Fajrin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 gram emas dan dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara syariat islam;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pemikahannya harmonis hingga sekarang;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan dokumen lainnya;
- 2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Simuntu, 05 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2017 di desa Simuntu, kecamatan Dampal Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saparudin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bapak Ahdal Harun dan A. Fajrin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pemikahannya harmonis hingga sekarang;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan perkawinannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan bukti **P.1**, **dan P.2** berupa fotokopi surat kartu tanda Penduduk, maka sesuai Pasal 7 angka 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* diajukan dalam wilayah

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon bertempat tinggal sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2017 di Desa Simuntu, Kecamatan Dampal Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saparudin, yang menikahkan diwakilkan kepada imam Desa Bernama Usman Arumi dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahdal Harun dan A. Fajrin, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 gram emas dan dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1, dan P.2** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Ahdal Harun dan A. Fajrin**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2017 di Desa Simuntu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saparudin dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahdal Harun dan A. Fajrin, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 gram emas dan dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Bahwa tidak ada yang pernah mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
2. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dengan terlebih dahulu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabulnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saparudin, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahdal Harun dan A. Fajrin, kedua saksi tersebut telah aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki dan perempuan muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, dan keduanya juga sama-sama telah mengakui adanya perkawinan maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l'anatut Thalibin juz II halaman 308 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya : *“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon II berupa 5 gram emas dan dibayar tunai, fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun pemikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi kependudukan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, karena itu pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pemikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan terhadap pemikahan yang bersangkutan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 7 angka (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Toli-Toli tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul akhir 1444 Hijriah, oleh kami Ihsan, SHI sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, SHI

Panitera,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Tii



ttd

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	.000,-
- Proses	: Rp	000,-
- Panggilan	: Rp	000,-
- Redaksi	: Rp.	000,-
- Meterai	: Rp	<u>000,-</u>
J u m l a h	: Rp	.000,-

(Nol rupiah)